



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
12. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
13. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II

KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
 - c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten;

-
- e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
 - j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
 - k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
 - l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
 - m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
 - n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
 - r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
 - s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
 - v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
 - w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;

- x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
 - y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
 - z. Kecamatan Klaten Utara;
 - aa. Kecamatan Klaten Tengah;
 - bb. Kecamatan Klaten Selatan;
 - cc. Kecamatan Kalikotes;
 - dd. Kecamatan Ngawen;
 - ee. Kecamatan Kebonarum;
 - ff. Kecamatan Wedi;
 - gg. Kecamatan Jogonalan;
 - hh. Kecamatan Gantiwarno;
 - ii. Kecamatan Prambanan;
 - jj. Kecamatan Manisrenggo;
 - kk. Kecamatan Kemalang;
 - ll. Kecamatan Karangnongko;
 - mm. Kecamatan Jatinom;
 - nn. Kecamatan Karanganom;
 - oo. Kecamatan Tulung;
 - pp. Kecamatan Polanharjo;
 - qq. Kecamatan Delanggu;
 - rr. Kecamatan Juwiring;
 - ss. Kecamatan Wonosari;
 - tt. Kecamatan Ceper;
 - uu. Kecamatan Pedan;
 - vv. Kecamatan Karangdowo;
 - ww. Kecamatan Cawas;
 - xx. Kecamatan Trucuk; dan
 - yy. Kecamatan Bayat.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 8 Agustus 2024

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 29

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2025



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
I. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10
III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	11
3.1.. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2.. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	12
IV. Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	67
V. Penutup.....	70

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
28. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan ~~Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah~~ Kabupaten Klaten;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
51. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
52. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
53. Peraturan Bupati Klaten Nomor 74 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten
54. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 adalah dokumen Rencana Kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud dan tujuan untuk :

1. Memberikan acuan dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
2. Memberikan acuan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
3. Memberikan acuan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4. Memberikan acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
5. Memberikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan untuk periode satu tahun anggaran pada tahun yang akan datang

6. Menentukan arah kebijakan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Klaten tahun 2025.
7. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
8. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Awal Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN SEMESTER II TAHUN BERKENAAN (2023)

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Usulan Rancangan Akhir Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dengan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023 secara umum selaras dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten 2023.

Hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

- 2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, diantaranya:
 - a. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan
 - d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Nasional
- 2.1.2. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Bakesbangpol tidak ada.
- 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Adanya Pebatasan Kegiatan atau PPKM sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan
 - b. Adanya Mutasi sehingga anggaran gaji masih tersisa banyak
- 2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

Pada beberapa kegiatan, kinerja kegiatan tidak dapat memenuhi target. Namun demikian, kegiatan tersebut tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kinerja program di Bakesbangpol Daerah Kabupaten Klaten.

- 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:
- a. Melakukan inovasi kegiatan yang tidak memerlukan tatap muka langsung
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar tidak ada kelebihan pagu gaji dan tunjangan ASN

Secara terinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023 Bakesbangpol Kabupaten Klaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9*100)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	100	100	100	100	300	300

8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%		100	100	100	100	200	200
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	0	2	2	100	1	3	300
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%		100	100	100	100	200	200
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/ Bulan	100	13	13	100	13	126	969,2307692
8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	100	12	12	100	1	113	11300
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%		100	100	100	100	200	200
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	80	10	10	100	2	92	4600
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	83	49	49	100	2	134	6700
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	87	20000	20000	100	2	20089	1004450

8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	100	1680	950	56,54761905	12	1062	8850
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	73	220	216	98,18181818	12	301	2508,333333
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61 Laporan	21	77	67	87,01298701	12	100	833,333333
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%		100	100	100	100	200	200
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	66	750	580	77,33333333	12	658	5483,333333
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	77	12	12	100	12	101	841,6666667
8	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	95	4	4	100	3	102	3400
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		100	100	100	12	112	933,333333

8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	83	2	2	100	100	185	185
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	0	7	7	100	7	14	200
8	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit	0	0	0		4	4	100
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	9.789.163.229	0			4	9789163233	2,44729E+11
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.764.925.373	2	2	100	2	7764925377	3,88246E+11
8	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit		2	2	100	2	4	200
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	13%		100	100	100	4	104	2600
						Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	15%		100	100	100	4	104	2600

8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa dilaksanakan	100%		75		0	100	100	100
8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5 Dokumen					1	1	100
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	750 Orang	85	1	1	100	150	236	157,3333333
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	381 Orang					0	0	#DIV/0!

8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Laporan	85	1	1	100	1	87	8700
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	10%		2	100	5000	4	104	2600
						Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	80%		60	100	166,6666667	65	165	253,8461538
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Politik Daerah yang dilaksanakan	500%	100				100	200	200

8	1	3	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	100	1	1	100	1	102	10200
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1385 Orang	100	3	3	100	277	380	137,1841155

8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	900 Orang	100.00 %	1	1	100	225	#VALUE!	#VALUE!
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	37 Laporan	100	9	9	100	5	114	2280
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yg dibina dan mendapatkan pengawasan	100%		100	81,63	81,63	100	182	181,63

8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan	100%		33	33	100	100	133	133
8	1	4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	100				1	101	10100
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	390 Orang	100	1	1	100	60	161	268,3333333
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	100				1	101	10100
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa terbentuk	100%		34	100	294,1176471	67	167	249,2537313

						Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	31%		6	5,83	97,16666667	12	18	148,5833333
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	450%		50		0	100	100	100
8	1	5	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen					1	1	100
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1500 Orang	100	1	1	100	300	401	133,6666667

8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	460 Orang	100				100	200	200
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Laporan	100	1	1	100	1	102	10200
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	100%	100	100	100	100	100	300	300
						Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	85%	100	0	100		80	280	350
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100%		17	17	100	100	117	117

8	1	6	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	2				1	3	300
8	1	6	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	4				1	5	500

8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1500 Orang	63,7	12	12	100	300	376	125,2333333
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	750 Orang	63,7				150	214	142,4666667

8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 Laporan	5				1	6	600
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	60 Dokumen	12	12	12	100	12	36	300

2.1.7 Data Pilah Gender tahun 2023

Berikut tersajikan data pilah gender yang tersaji dalam aplikasi <https://siga.dp3akb.jatengprov.go.id/app/>:

Tabel 2.1.1. Data Pilah Gender

No	Bidang/ Indikator	Data Pilah		Jumlah	Satuan
		Laki-laki	Perempuan		
1	Jumlah Anggota DPRD	163	34	197	org
2	Jumlah Pimpinan DPRD	12	5	17	org
3	Jumlah Pengurus Harian Partai Politik	572	246	818	org
4	Jumlah Calon Legislatif (Caleg)	804	518	1322	org
5	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Hak Pilih pada Pemilu Legislatif	864.695.594	872.487.846	1737183.44	org
6	Jumlah Penduduk Yang Gunakan Hak Pilih pada Pemilu Legislatif	514483	521790	1036273	org

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Politik dan Kewaspadaan Nasional, serta Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

Pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat adalah memberikan pembinaan dan layanan fasilitasi bantuan hibah bagi partai politik dan ormas. Selain itu dilaksanakannya pelayanan pendataan dan pencatatan bagi organisasi masyarakat. Sedangkan pada bidang wawasan dan ideologi bangsa dilaksanakannya sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan bela Negara dengan sasaran kegiatan seluruh elemen masyarakat.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial			85%	80%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan			100%	100%	100%	100%	81,63%	100%	100%	100%	
4	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan			1%	4%	7%	11%	1,04%	4%	7%	11%	
5	Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan			15%	4%	7%	10%	11,67%	4%	10%	11%	
6	Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar			6%	12%	18%	25%	5,83%	12,9%	18%	25%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa Terbentuk			34%	67%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	
8	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik			2%	4%	6%	8%	2,00%	2,17%	6%	8%	
9	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol			65%	70%	75%	80%	100%	100%	75%	80%	
10	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

- 1). Beberapa target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tertuang dalam dokumen RPJMD belum tercapai sesuai yang direncanakan. Namun bukan berarti hal ini merupakan ketidakberhasilan BAKESBANGPOL dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pelayanan dasar di bidang Pemerintahan Umum. Bakesbangpol terus berupaya untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menghambat pencapaian target.
- 2). Beberapa permasalahan yang menjadi isu penting dan terus mendapat perhatian diantaranya adalah
 - a. Semakin meningkatnya penyebaran beragam ideologi diluar ideologi Pancasila yang berpotensi merusak dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Menurunnya penguatan internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada diri generasi muda yang berpotensi menimbulkan sikap intoleran;
 - c. Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di Kabupaten Klaten, hal ini terbukti dengan jumlah kasus yang terjadi sebanyak 73 kasus menduduki peringkat 3 tertinggi di Jawa Tengah;
 - d. Banyaknya penduduk asal Kabupaten Klaten yang terpapar faham radikalisme, terorisme dan ekstrimisme, hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah eks narapidana terorisme (napiter) di Kabupaten Klaten menduduki peringkat tertinggi se-Jawa Tengah.
- 3). Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah yang Berdampak Pada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
 - a) Kinerja Bakesbangpol tidak akan tercapai maksimal karena adanya kegiatan yang kemungkinan tidak tercapai 100% sehingga akan mempengaruhi pencapaian visi misi (kepala daerah).
- 4). Tantangan dan Peluang Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tantangan



- Kerjasama dan dukungan sektor lain masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Bakesbangpol saja.
- b. Peluang
- Menguatnya komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan kesehatan dari APBN dan APBD.
 - Adanya dukungan dari Pemerintah melalui SE Permendagri untuk pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemerintahan Umum
 - Adanya dukungan dari Bakesbangpol Provinsi dalam melaksanakan kegiatan di urusan yang ditangani oleh Bakesbangpol Kabupaten.
- 5). Formulasi isu penting (rekomendasi & catatan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten, adalah
- a. Semakin meningkatnya penyebaran beragam ideologi diluar ideologi Pancasila yang berpotensi merusak dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dilakukan Pembumih nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat usia sekolah dan masyarakat umum secara masif dan berkesinambungan atau berkelanjutan, dan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Melakukan sosialisasi moderasi beragama dan pluralisme budaya Indonesia kepada masyarakat usia sekolah dan masyarakat umum guna sedini mungkin yaitu melakukan cegah-tangkal paham-paham yang membahayakan eksistensi ideologi Pancasila.
 - b. Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di Kabupaten Klaten, hal ini terbukti dengan jumlah kasus yang terjadi sebanyak 73 kasus menduduki peringkat 3 tertinggi di Jawa Tengah sehingga untuk mengatasinya dilakukan kerjasama dengan semua stakeholder, untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh masyarakat tentang bahaya narkoba dan



Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir Awal RKPD

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Akhir Awal RKPD Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.461.949.241	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.840.180.700	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	3.196.649.241	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	3.185.374.700	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	3.043.649.241	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	3.045.374.700	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	153.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	140.000.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%	109.796.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%	273.039.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.539.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	37.500.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Klaten	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Klaten	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.573.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	62.223.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	88.262.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	142.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62.232.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	57.242.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	230.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	37.305.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	170.000.000
Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 unit	2.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 unit	5.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.437.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	35.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	7.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	20.000.000
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Klaten	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	10%	204.158.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Klaten	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	10%	350.000.000
	Kab. Klaten	Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	11%			Kab. Klaten	Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan	11%	

							wawasan kebangsaan			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Klaten	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa dilaksanakan	100%	204.158.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Klaten	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa dilaksanakan	100%	350.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 orang	50.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 orang	30.000.000
	Pembentukan Paskibraka	Kab. Klaten	Jumlah Paskibraka	80 Orang	100.000.000	Pembentukan Paskibraka	Kab. Klaten	Jumlah Paskibraka	80 Orang	270.000.000
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Klaten	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka	1 Dokumen	45.000.000	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Klaten	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka	1 Dokumen	50.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Klaten	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	8%	1.143.197.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Klaten	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	8%	1.171.767.000
		Kab. Klaten	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	75%			Kab. Klaten	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	100%	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Klaten	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Politik Daerah yang dilaksanakan	100%	1.143.197.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Klaten	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Politik Daerah yang dilaksanakan	100%	1.171.767.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	277 Orang	1.121.197.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120 orang	1.171.767.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Klaten	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	100%	421.859.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Klaten	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	100%	230.000.000	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Klaten	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan	100%	421.859.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Klaten	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan	100%	230.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Orang	402.859.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 orang	230.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Klaten	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa terbentuk	100%	81.463.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Klaten	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa terbentuk	100%	35.000.000	
		Kab. Klaten	Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	25%			Kab. Klaten	Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	25%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Klaten	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	100%	81.463.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Klaten	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	100%	35.000.000	



	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 orang	65.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	30.000.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	10.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	5.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Klaten	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	100%	402.829.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Klaten	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	100%	90.000.000
		Kab. Klaten	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	100%			Kab. Klaten	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	100%	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Klaten	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100%	402.829.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Klaten	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100%	90.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	65.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	30.000.000
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	260.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	60.000.000
TOTAL					5.715.455.241	-	-	-		5.717.180.700



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2025 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial; isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa.
3. Terorisme dan radikalisme; banyaknya warga negara indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme seperti ISIS
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai.
6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sosialnya.
7. Kualitas demokrasi; nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis serba instan dan mengabaikan proses yang berkualitas

Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2024 antara lain :

1. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial terutama konflik SARA dengan Penguatan Timdu PKS
2. Revitalisasi dan Aktualisaasi Nilai-Nilai Pancasila

3. Pelaksanaan Perda P4GN melalui Penyusunan Pergub, Efektifitas Timdu P4GN, Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN Rencana Kerja 2024 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
4. Pengawasan Ormas serta Penguatan Timdu Pengawasan Ormas
5. Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah Jawa Tengah
6. Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama
7. Penguatan Partisipasi Politik dan peningkatan peran partai politik

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rancangan Akhir Awal Rencana Kerja Tahun 2025

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab Klaten	Program dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025
Memantapkan supermasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan	Perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya politik 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial, dan budaya

			5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
--	--	--	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sesuai Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 telah ditetapkan bahwa tujuan Kabupaten Klaten yaitu Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial serta pendidikan politik masyarakat

Tabel 3.2. Tujuan sasaran Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke
					2025
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial serta pendidikan politik masyarakat		Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	Jumlah Konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama dan budaya tahun n / Konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama dan budaya tahun n tertangani X 100%	%	100
	Terkendalinya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku, ras dan agama	Persentase potensi Konflik Sosial tertangani	Jumlah Konflik Sosial tertangani tahun n / Jumlah Konflik Sosial tahun n X 100%	%	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke
					2025
	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten)	Jumlah pemilih hadir di TPS di bagi daftar pemilih tetap tahun n X 100	%	87

b. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sesuai Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 telah ditetapkan bahwa sasaran Bakesbangpol Kabupaten Klaten adalah

- a. Terkendalinya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku, ras dan agama
- b. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi.

**Tabel 3.6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PADA RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten	100%	3.840.180.700	DAU		100%	Rp3.291.599.000
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Kab. Klaten	100%	10.000.000	DAU		100%	Rp5.000.000
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten	100%	3.185.374.700	DAU		100%	Rp3.022.507.000
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten	17 orang/bulan	3.045.374.700	DAU		13 orang/bulan	Rp2.871.507.000
8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten	1 Dokumen	140.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp151.000.000
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten	100%	273.039.000	DAU		100%	Rp120.573.000
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Klaten	2 Paket	8.539.000	DAU		2 Paket	Rp2.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Klaten	2 Paket	37.500.000	DAU		2 Paket	Rp9.000.000
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Klaten	2 Paket	25.000.000	DAU		2 Paket	Rp10.000.000
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Klaten	12 Dokumen	2.000.000	DAU		12 Dokumen	Rp4.573.000
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten	12 Laporan	50.000.000	DAU		12 Laporan	Rp15.000.000
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten	12 Laporan	150.000.000	DAU		12 Laporan	Rp80.000.000
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten	100%	142.000.000	DAU		100%	Rp92.262.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Klaten	12 Laporan	72.000.000	DAU		12 Laporan	Rp29.000.000
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Klaten	12 Laporan	70.000.000	DAU		12 Laporan	Rp62.232.000
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Klaten	100%	230.000.000	DAU		100%	Rp51.257.000
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Klaten	7 unit	170.000.000	DAU		7 unit	Rp34.501.000
8	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Klaten	4	5.000.000	DAU		4 Unit	Rp2.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Klaten	2 Unit	35.000.000	DAU		2 Unit	Rp5.756.000
8	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Klaten	9 Unit	20.000.000	DAU		5 Unit	Rp7.000.000
8	1	2			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	Kab. Klaten	7%	350.000.000	DAU		10%	Rp169.290.000
						Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	Kab. Klaten	7%				11%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa dilaksanakan	Kab. Klaten	100%	350.000.000	DAU		100%	Rp169.290.000
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Klaten	150 orang	30.000.000	DAU		150 orang	Rp55.000.000
8	1	2	2.01	8	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab. Klaten	80 orang	270.000.000	DAU		80 orang	Rp100.000.000
8	1	2	2.01	9	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka	Kab. Klaten	1 Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	1	3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	Kab. Klaten	6%	1.171.767.000	DAU		8%	Rp1.134.432.000
					Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	Kab. Klaten	70%		DAU		75%	
8	1	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Politik Daerah yang dilaksanakan	Kab. Klaten	100%	1.171.767.000	DAU		100%	Rp1.134.432.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pemantauan Situasi Politik								
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Klaten	277 Orang	1.171.767.000	DAU		277 Orang	Rp1.117.432.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	1	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	Kab. Klaten	100%	230.000.000	DAU		1	Rp668.837.000
8	1	4	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan	Kab. Klaten	100%	230.000.000	DAU		1	Rp668.837.000
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Klaten	120 Orang	DAU		60 orang	Rp627.837.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa terbentuk	Kab. Klaten	100%	35.000.000	DAU	0%	Rp107.784.000	
				Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	Kab. Klaten	18%		DAU	25%		
8	1	5	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	Kab. Klaten	100%	35.000.000	DAU	100%	Rp107.784.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Klaten	450 orang	30.000.000	DAU		300 orang	Rp90.000.000
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Klaten	100 Orang	5.000.000	DAU		100 Orang	Rp9.500.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	1	6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	Kab. Klaten	100%	90.000.000	DAU		100%	Rp479.177.000
					Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	Kab. Klaten	80%		DAU		85%	
8	1	6	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	Kab. Klaten	100%	90.000.000	DAU		100%	Rp479.177.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Klaten	500 Orang	30.000.000	DAU		300 orang	Rp80.000.000
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	12 Dokumen	60.000.000	DAU		12 Dokumen	Rp300.000.000
Jumlah									Rp 5.717.180.700				Rp5.851.119.000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2025 yang disusun merupakan pedoman sebagai arah kebijakan penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2025. Sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan ini akan lebih bersifat operasional sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian.

Prioritas kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menekan konflik sosial dan penanganan konflik sosial. Beberapa kegiatan yang juga dilaksanakan OPD lain seperti kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba maupun kegiatan lain bidang kesatuan bangsa dan politik seperti sosialisasi wawasan kebangsaan yang menjadi tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar dilaksanakan koordinasi sehingga tidak overlapping sasaran.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Akhir APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025.

Agar pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2025 tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2025 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi

juga memuat kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN/BLN, maka setiap Perangkat Daerah wajib mensinkronkan dengan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Rancangan Akhir Rencana Kerja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten ini disusun selaras dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dengan proyeksi rencana belanja daerah sebesar Rp5.717.180.700,- untuk membiayai 6 program.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2024 diharapkan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yakni: **“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd
SKI MULYANI